

**PENGUMUMAN****LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2018/Periodik - 2017)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MAHALLI
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 16967

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	423.000.000
1. Tanah Seluas 224 m2 di KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/48 m2 di BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/36 m2 di TRIKORA / WINGGA RT. RW. Kode Pos. , [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 128.000.000		
4. Tanah Seluas 190 m2 di BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/36 m2 di BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	154.500.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000		
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	70.000.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	119.279.784
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	766.779.784
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	173.517.385
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	593.262.399

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id).  
Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri



oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **7 November 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.